



<https://ejournal.windari.com/index.php/lis>

Strategi Komunikasi Penyidik Kepolisian Dalam Mengungkap Peredaran Obat Ilegal Di Kota Mataram

I Kadek Sudarma¹, I Wayan Ardhi Wirawan², Ni Putu Sudewi Budhawati³

Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram^{1,2,3}
E-mail: agussudarmono579@gmail.com



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Keywords:	Abstract
<i>communication strategy, police investigators, circulation, illegal drugs</i>	<i>This study aims to examine the communication strategy of West Nusa Tenggara Police investigators in uncovering the circulation of illegal drugs in Mataram City. The communication strategy applied by police investigators is organisational communication with related institutions, namely the Food and Drug Administration and the Trade Office. Based on the results of the research, it was found that cases of illegal drug distribution in Mataram City have reached an alarming level with a significant increase in the number of cases, variations in the types of drugs in circulation, and increasingly sophisticated modus operandi. The data shows an increase in cases from 1,234 in 2022 to 1,450 in 2023. This problem not only impacts individual health but also triggers other criminal acts, damages market competition, and affects people's work productivity. The Trade Office sees it from the perspective of consumer protection and market stability, where illegal drugs sold at lower prices undermine healthy competition and endanger consumers because their quality and safety are not guaranteed. The Mataram Food and Drug Administration emphasised that illegal drugs pose a serious threat to public health as they are often produced without clear standards, contain hazardous ingredients, and are not guaranteed to be safe.</i>

Kata kunci:	Abstrak
<i>strategi komunikasi, penyidik kepolisian, peredaran, obat ilegal</i>	<i>Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi komunikasi penyidik Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat dalam mengungkap peredaran obat ilegal di Kota Mataram. Strategi komunikasi yang diterapkan penyidik kepolisian adalah komunikasi organisasi dengan lembaga terkait, yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Dinas Perdagangan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kasus peredaran obat ilegal di Kota Mataram telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan dengan peningkatan signifikan dalam jumlah kasus, variasi jenis obat yang beredar, dan</i>

	modus operandi yang semakin canggih. Data menunjukkan peningkatan kasus dari 1.234 pada tahun 2022 menjadi 1.450 pada tahun 2023. Masalah ini tidak hanya berdampak pada kesehatan individu tetapi juga memicu tindak kriminalitas lainnya, merusak persaingan pasar, dan mempengaruhi produktivitas kerja masyarakat. Pihak Dinas Perdagangan melihat dari perspektif perlindungan konsumen dan stabilitas pasar, dimana obat ilegal yang dijual dengan harga lebih murah merusak persaingan sehat dan membahayakan konsumen karena kualitas dan keamanannya tidak terjamin. Badan Pengawas Obat dan Makanan Mataram menekankan bahwa obat ilegal merupakan ancaman serius bagi kesehatan masyarakat karena seringkali diproduksi tanpa standar yang jelas, mengandung bahan berbahaya, dan tidak terjamin keamanannya
--	---

I. PENDAHULUAN

Komunikasi memegang peranan yang sangat penting dalam membangun tatanan sosial yang lebih berkualitas jika diaktualisasikan oleh para pihak yang melakukan komunikasi mampu menyampaikan pesan dan menerima pesan dengan baik. Proses komunikasi dalam rangka untuk mencapai sasaran yang tepat membutuhkan strategi yang tepat sehingga menghindari terjadinya kesenjangan yang berpeluang terjadi. Fenomena tersebut jika diteropong dalam suatu komunikasi kelompok dan organisasi yang melibatkan kelompok-kelompok yang terlibat dalam suatu proses komunikasi. Merujuk pada Littlejohn & Foss (2011) bahwa dalam komunikasi, kelompok yang melakukan komunikasi kerap kali dipandang seperti sistem sinbernetika dimana informasi dan pengaruh datang kepada kelompok (*input*), dan kelompok pengolah informasi ini dan hasilnya berputar kembali untuk mempengaruhi orang lain (*output*).

Strategi komunikasi organisasi menjadi aspek krusial dalam interaksi antar lembaga penegak hukum. Menurut teori komunikasi organisasi yang dikemukakan oleh Pace dan Faules (2010), Strategi komunikasi dapat mempengaruhi efektivitas penyampaian pesan, pemahaman bersama, dan pengambilan keputusan dalam konteks organisasi. Dalam konteks lembaga penegak hukum di Nusa Tenggara Barat, gaya komunikasi yang tepat dapat memfasilitasi pertukaran informasi yang lancar, meminimalisasi kesalahpahaman, dan meningkatkan sinergi antar lembaga dalam menangani kasus-kasus hukum (Pace & Faules, 2010).

Peredaran obat ilegal di Indonesia, termasuk di wilayah Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), masih menjadi masalah serius yang mengancam kesehatan masyarakat dan merugikan perekonomian negara. Menurut data dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sepanjang tahun 2020, telah ditemukan 1.539 temuan obat ilegal dengan nilai

keekonomian mencapai Rp 136,5 miliar. Angka ini menunjukkan bahwa peredaran obat ilegal masih marak terjadi meskipun upaya pemberantasan terus dilakukan (BPOM RI, 2021). Di Mataram sendiri, kasus peredaran obat ilegal cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dengan modus operandi yang semakin canggih dan terorganisir (Polda NTB, 2022).

Pemberantasan obat ilegal merupakan salah satu prioritas utama Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTB. Dalam menjalankan tugas ini, penyidik dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari kompleksitas jaringan pengedar, keterbatasan sumber daya, hingga resistensi dari pelaku kejahatan. Salah satu aspek krusial yang mempengaruhi keberhasilan penyidikan adalah kemampuan komunikasi penyidik. Gaya komunikasi yang efektif dapat membantu penyidik dalam mengumpulkan informasi, melakukan interogasi, dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait (Mulyana, 2018).

Karakteristik geografis dan sosial budaya Mataram yang unik juga menambah kompleksitas dalam upaya pemberantasan obat ilegal. Sebagai daerah wisata yang populer, Mataram memiliki tingkat mobilitas penduduk yang tinggi, yang dapat menjadi celah bagi peredaran obat ilegal. Selain itu, keberagaman etnis dan bahasa di wilayah ini menuntut penyidik untuk memiliki kemampuan komunikasi antarbudaya yang baik. Penelitian oleh Suryani (2019) menunjukkan bahwa keberhasilan penyidikan kasus narkoba di NTB sangat dipengaruhi oleh kemampuan penyidik dalam memahami dan beradaptasi dengan konteks sosial budaya setempat.

Fenomena peredaran obat ilegal di Mataram juga tidak terlepas dari faktor ekonomi dan kesadaran masyarakat. Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan di beberapa wilayah NTB menjadi faktor pendorong maraknya peredaran obat ilegal sebagai sumber penghasilan alternatif. Di sisi lain, rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya obat ilegal dan kurangnya akses terhadap layanan kesehatan yang memadai turut berkontribusi pada permintaan akan obat-obatan ilegal yang umumnya dijual dengan harga lebih murah (Dinas Kesehatan NTB, 2021). Dalam konteks ini, kemampuan penyidik untuk berkomunikasi secara efektif dengan berbagai lapisan masyarakat menjadi sangat penting.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pratiwi (2018) mengenai "Strategi Komunikasi Penyidik dalam Penanganan Kasus Narkoba di Polda NTB" menunjukkan bahwa keberhasilan pengungkapan kasus narkoba sangat bergantung pada kemampuan penyidik dalam membangun rapport dan mendapatkan informasi dari tersangka maupun saksi. Namun, penelitian tersebut belum secara spesifik menganalisis strategi komunikasi yang

digunakan oleh penyidik, terutama dalam konteks pemberantasan obat ilegal. Hal ini menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu dieksplorasi lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas penyidikan kasus obat ilegal di Mataram.

Studi lain yang dilakukan oleh Wijaya (2020) tentang "Efektivitas Komunikasi Interpersonal Penyidik dalam Pengungkapan Kasus Pidana di Polres Mataram" mengungkapkan bahwa penyidik yang mampu menerapkan gaya komunikasi yang fleksibel dan adaptif cenderung lebih berhasil dalam mengungkap kasus-kasus pidana. Namun, penelitian ini masih bersifat umum dan tidak secara khusus membahas kasus obat ilegal. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih spesifik untuk menganalisis gaya komunikasi penyidik dalam konteks pemberantasan obat ilegal di Mataram.

Berdasarkan latar belakang tersebut, sangat penting untuk dilakukan Strategi komunikasi penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda NTB dalam pemberantasan obat ilegal di Kota Mataram. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan Strategi komunikasi yang efektif bagi penyidik, sehingga dapat meningkatkan keberhasilan upaya pemberantasan obat ilegal di wilayah Mataram.

Berdasarkan paparan latar belakang ini, terdapat kesenjangan yang jelas dalam kajian mengenai strategi komunikasi dalam pemberantasan obat ilegal di Mataram. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai strategi komunikasi yang efektif yang digunakan oleh penyidik di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda NTB. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan baru dalam pengembangan strategi komunikasi yang lebih efektif dalam upaya pemberantasan peredaran obat ilegal di wilayah Mataram.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif dengan desain studi kasus untuk menggali strategi komunikasi yang diterapkan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTB dalam pemberantasan obat ilegal di Kota Mataram. Subjek penelitian adalah penyidik Ditreskrimsus yang terlibat langsung dalam pengungkapan kasus obat ilegal, yang dipilih menggunakan teknik purposif. Sumber data terdiri dari wawancara mendalam dengan penyidik, observasi partisipatif terhadap interaksi komunikasi dalam lingkungan Ditreskrimsus, serta analisis dokumen terkait seperti kebijakan dan laporan kegiatan. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data adalah pedoman wawancara semi-terstruktur dan catatan observasi lapangan. Analisis data dilakukan dengan teknik reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, yang juga disertai verifikasi

menggunakan triangulasi data untuk memastikan validitas temuan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami dinamika komunikasi yang terjadi dalam konteks pemberantasan obat ilegal secara mendalam, serta memberikan dasar yang cukup untuk replikasi penelitian serupa.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Strategi Komunikasi Kepolisian dalam Mengungkap Peredaran Obat ilegal di Kota Mataram

Peredaran obat ilegal di Kota Mataram berdasarkan hasil pengumpulan data di lapangan dikategorikan relatif tinggi. Data menunjukkan peningkatan kasus dari 1.234 pada tahun 2022 menjadi 1.450 pada tahun 2023. Masalah ini tidak hanya berdampak pada kesehatan individu tetapi juga memicu tindak kriminalitas lainnya, merusak persaingan pasar, dan mempengaruhi produktivitas kerja masyarakat. Direktorat Reskrimsus Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) berkomitmen untuk mengungkap kasus peredaran obat ilegal, pemberantasan peredaran obat ilegal, dan penanggulangan peredaran obat ilegal tersebut dengan melakukan strategi komunikasi, baik dengan pihak internal maupun pihak internal, yaitu di luar lembaga kepolisian.

Berdasarkan hasil observasi yang dilaksanakan di Direktorat Reskrimsus Polda NTB tentang strategi komunikasi penyidik dalam pengungkapan tindak pidana perdagangan obat ilegal, peneliti diberikan banyak dukungan serta respon positif dan antusias baik dari pimpinan maupun dari seluruh anggota yang ada di Direktorat Reskrimsus Polda NTB sehingga peneliti dengan lebih mudah mendapatkan informasi serta tidak banyak kendala yang peneliti temukan untuk mendapatkan data penelitian, baik kendala secara teknis maupun yang non teknis pada saat melakukan observasi langsung di Direktorat Reskrimsus Polda NTB.

Peredaran obat ilegal dapat di tanggulangi melalui strategi komunikasi seperti diungkap oleh Kepala Subdit 4 Ditreskrimsus Polda NTB Harimbawa yang pada garis besarnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

“...Dalam penanganan kasus peredaran obat ilegal di Kota Mataram, kami menghadapi berbagai faktor yang saling memengaruhi. Faktor pendukung yang signifikan adalah kerja sama yang baik antara Ditreskrimsus Polda NTB dengan instansi terkait, seperti BBPOM Mataram, Dinas Kesehatan, dan Kejaksaan. Pertukaran informasi dan koordinasi yang intensif sangat membantu dalam mengungkap jaringan pelaku dan menyita barang bukti. Selain itu, dukungan dari masyarakat juga sangat penting, terutama dalam memberikan informasi awal tentang aktivitas mencurigakan” (Wawancara pada tanggal 22 Januari, 2025, pukul 13.00-14.30 Wita).

Berdasarkan narasi di atas, penanganan kasus peredaran obat ilegal di Kota Mataram melibatkan berbagai faktor yang saling memengaruhi. Kerja sama antara Direktorat Reserse

Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan instansi terkait, seperti Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Mataram, Dinas Kesehatan, dan Kejaksaan, menjadi faktor pendukung yang signifikan. Pertukaran informasi dan koordinasi yang intensif antara lembaga-lembaga ini sangat membantu dalam mengungkap jaringan pelaku dan menyita barang bukti. Selain itu, dukungan dari masyarakat juga sangat penting, terutama dalam memberikan informasi awal tentang aktivitas mencurigakan.

Kerjasama dalam menangani peredaran obat ilegal diindikasikan oleh kegiatan komunikasi dan koordinasi yang dilakukan pada bulan November 2023, ketika BBPOM Mataram bersama Polda NTB berhasil mengungkap peredaran 14.500 tablet obat ilegal jenis Tramadol dan Trihexyphenidil di wilayah Kota Mataram. Operasi ini berawal dari informasi Direktorat Intelijen Badan POM mengenai pengiriman obat-obatan tertentu tanpa izin edar ke Mataram. Tim PPNS BBPOM Mataram dan Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda NTB kemudian bergerak ke lokasi dan berhasil mengamankan pemilik beserta barang bukti. Tersangka dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan ancaman hukuman penjara hingga 12 tahun dan denda maksimal lima milyar rupiah.

Pada September 2024, BBPOM Mataram mengintensifkan pengawasan terhadap depot jamu, toko herbal, dan sarana distribusi lainnya. Dari 40 sarana yang diperiksa, 9 di antaranya tidak memenuhi ketentuan, dan ditemukan 70 produk ilegal atau mengandung bahan kimia obat sebanyak 2.732 pcs dengan nilai ekonomi mencapai Rp400 juta. Produk-produk ilegal ini dimusnahkan di tempat, dan pemilik sarana diberikan sanksi administratif serta diwajibkan menandatangani pernyataan untuk tidak mengulangi pelanggaran serupa.

3.2 Strategi Komunikasi Kepolisian dalam Pemberantasan Obat Ilegal

Kasus peredaran obat ilegal yang mengemuka di Kota Mataram ditangani oleh kepolisian melalui strategi komunikasi dalam membrantas peredaran obat ilegal tersebut. Berkenaan dengan itu, peredaran obat ilegal dapat di tanggulangi melalui strategi komunikasi seperti diungkap oleh Kepala Subdit 4 Ditreskrimsus Polda NTB, Gede Harimbawa yang pada garis besar mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

"Peredaran obat ilegal di Kota Mataram ini sudah sangat mengkhawatirkan. Kami melihat ada peningkatan signifikan dalam jumlah kasus, variasi jenis obat yang beredar, dan juga modus operandi yang semakin canggih. Ini bukan lagi masalah kesehatan semata, tetapi juga masalah keamanan. Obat-obatan ilegal ini seringkali menjadi pemicu tindak kriminalitas lainnya, dan merusak generasi muda kita. Oleh karena itu, kami di Ditreskrimsus Polda NTB berkomitmen untuk terus memberantas peredaran obat ilegal ini sampai ke akar-akarnya." (Wawancara pada tanggal 22 Januari, 2025, pukul 11.00-12.30 Wita).

Berdasarkan narasi yang disampaikan oleh informan doi atas, mengindikasikan bahwa peningkatan signifikan dalam kasus peredaran obat ilegal di Kota Mataram. Data dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) NTB menunjukkan bahwa kasus penyalahgunaan narkoba, termasuk obat-obatan terlarang, mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2022, terdapat 1.234 kasus, dan pada tahun 2023, jumlahnya meningkat menjadi 1.450 kasus. Hal ini mengindikasikan bahwa peredaran obat ilegal di wilayah tersebut semakin meluas dan mengkhawatirkan.

Selain peningkatan jumlah kasus, variasi jenis obat yang beredar juga semakin beragam. Modus operandi yang digunakan oleh para pelaku juga semakin canggih, memanfaatkan teknologi dan jaringan yang luas. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum dalam memberantas peredaran obat ilegal. Dampak dari peredaran obat ilegal tidak hanya merusak kesehatan individu, tetapi juga memicu tindak kriminalitas lainnya. Banyak kasus kejahatan, seperti pencurian dan kekerasan, yang dilakukan oleh pelaku di bawah pengaruh obat-obatan terlarang.

Berdasarkan pemaparan diatas, Ditreskrimsus Polda NTB berkomitmen untuk terus memberantas peredaran obat ilegal sampai ke akar-akarnya. Upaya ini dilakukan melalui berbagai strategi, seperti peningkatan patroli, penindakan tegas terhadap pelaku, dan kerja sama dengan instansi terkait. Selain itu, upaya pencegahan juga dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

Selain itu juga data di perkuat dengan hasil Wawancara Putu Sukanata selaku Polri mengatakan bahwa :

“...meskipun peredaran obat ilegal di Kota Mataram memang masalah yang serius, kita perlu melihatnya dari perspektif yang lebih luas. Kita tidak bisa hanya fokus pada penindakan, tetapi juga harus memperhatikan akar masalahnya. Saya melihat bahwa faktor ekonomi dan sosial memiliki peran yang signifikan dalam mendorong orang untuk terlibat dalam peredaran obat ilegal. Banyak dari mereka yang terjerumus karena kesulitan ekonomi atau kurangnya lapangan pekerjaan. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya obat ilegal juga menjadi faktor penting. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa strategi penanganan yang efektif harus melibatkan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya penegakan hukum, tetapi juga pemberdayaan ekonomi dan edukasi masyarakat. (Wawancara pada tanggal 24 Januari, 2025, pukul 09.00-10.30 Wita).

Ungkapan yang disampaikan oleh informan di atas menekankan perlunya pergeseran fokus dalam penanganan peredaran obat ilegal di Kota Mataram. Menurutnya, pendekatan yang hanya mengandalkan penindakan tidak akan efektif jika akar masalahnya tidak diatasi. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Kota Mataram pada tahun 2023 mencapai 7,82%, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Kondisi ini dapat mendorong sebagian masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas ilegal, termasuk peredaran obat ilegal, sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

Faktor ekonomi dan sosial sebagai pendorong utama peredaran obat ilegal. Survei dari Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia menunjukkan bahwa 60% pelaku peredaran obat ilegal di Indonesia berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Selain itu, faktor lingkungan sosial, seperti pergaulan dengan pengguna obat ilegal, juga dapat mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam aktivitas terlarang ini.

Peredaran obat ilegal dapat di tanggulangi melalui strategi komunikasi seperti diungkap oleh Yanti sebagai PNS Dinas Perdagangan Prov NTB mengatakan bahwa:

“...Dari perspektif Dinas Perdagangan, peredaran obat ilegal di Kota Mataram ini bukan hanya masalah penegakan hukum, tetapi juga masalah perlindungan konsumen dan stabilitas pasar. Kami melihat bahwa obat ilegal seringkali dijual dengan harga yang jauh lebih murah daripada obat resmi, sehingga merusak persaingan yang sehat. Ini merugikan pedagang yang patuh pada regulasi dan berpotensi membahayakan konsumen karena kualitas dan keamanan obat ilegal tidak terjamin. Kami berupaya untuk memperkuat pengawasan terhadap peredaran obat di pasar-pasar dan toko-toko, serta meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya membeli obat dari sumber yang terpercaya.” (Wawancara pada tanggal 31 Januari, 2025, pukul 10.00-11.00 Wita)

Berdasarkan ungkapan yang disampaikan oleh informan di atas terungkap bahwa peredaran obat ilegal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak persaingan pasar yang sehat. Obat ilegal seringkali dijual dengan harga yang lebih murah, membuat pedagang resmi kesulitan bersaing. Hal ini juga merugikan konsumen karena kualitas dan keamanan obat ilegal tidak terjamin. Berita di media sosial seringkali menampilkan keluhan konsumen tentang efek samping yang mereka alami setelah mengonsumsi obat ilegal yang dibeli secara online atau di pasar gelap.

Dinas Perdagangan Provinsi NTB berupaya memperkuat pengawasan terhadap peredaran obat di pasar dan toko. Mereka bekerja sama dengan BPOM dan aparat penegak hukum untuk melakukan razia dan penindakan terhadap pedagang yang menjual obat ilegal. Di media sosial, seringkali diunggah video atau foto razia yang dilakukan oleh petugas gabungan,

menunjukkan upaya pemerintah dalam memberantas peredaran obat ilegal.

Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya membeli obat dari sumber yang terpercaya juga menjadi fokus Dinas Perdagangan. Mereka melakukan sosialisasi melalui berbagai media, termasuk media sosial, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya obat ilegal. Selain itu, mereka juga bekerja sama dengan komunitas-komunitas untuk memberikan edukasi langsung kepada masyarakat. Di media sosial, seringkali ditemukan unggahan berisi informasi tentang ciri-ciri obat ilegal dan tips memilih obat yang aman.

Peredaran obat ilegal dapat mengganggu stabilitas pasar dan menurunkan kepercayaan konsumen terhadap produk obat-obatan. Dinas Perdagangan berupaya untuk menjaga stabilitas pasar dengan memastikan bahwa semua obat yang beredar di pasaran memenuhi standar kualitas dan keamanan. Mereka juga berupaya untuk membangun kepercayaan konsumen dengan memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang produk obat-obatan. Di media sosial, seringkali diunggah testimoni dari konsumen yang merasa puas dengan produk obat-obatan yang mereka beli dari sumber yang terpercaya.

Peredaran obat ilegal dapat di tanggulangi melalui strategi komunikasi seperti diungkap oleh Veriyanto yang bertugas di BBPOM Mataram mengatakan bahwa :

“....peredaran obat ilegal di Kota Mataram adalah ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Kami melihat bahwa obat ilegal seringkali diproduksi tanpa standar yang jelas, mengandung bahan berbahaya, dan tidak terjamin keamanannya. Ini dapat menyebabkan efek samping yang fatal bagi konsumen. Kami terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran obat ilegal, baik secara online maupun offline. Kami juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memberantas jaringan pelaku yang terlibat dalam aktivitas ini. Selain itu, kami mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membeli obat dari sumber yang terpercaya dan memiliki izin edar.” (Wawancara pada tanggal 03 Februari 2025, pukul 11.00-12.30 Wita).

Ungkapan yang disampaikan oleh informan di atas pada dasarnya menegaskan bahwa peredaran obat ilegal di Kota Mataram merupakan ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Obat ilegal seringkali diproduksi tanpa standar yang jelas, mengandung bahan berbahaya, dan tidak terjamin keamanannya. Hal ini dapat menyebabkan efek samping yang fatal bagi konsumen, bahkan kematian. Kasus-kasus keracunan dan efek samping serius akibat mengonsumsi obat ilegal seringkali muncul di media sosial, menunjukkan betapa berbahayanya masalah ini. Selain itu, peredaran obat ilegal dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan dan obat-obatan yang beredar di pasaran.

3.3 Strategi Komunikasi Kepolisian dalam Pengawasan Peredaran Obat Ilegal

BBPOM Mataram terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap

peredaran obat ilegal, baik secara online maupun offline. Mereka bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memberantas jaringan pelaku yang terlibat dalam aktivitas ini. Razia dan penindakan seringkali dilakukan di pasar-pasar, toko-toko, dan sarana distribusi lainnya. BBPOM juga aktif memantau peredaran obat ilegal secara online dan melakukan tindakan tegas terhadap toko online yang menjual obat ilegal. Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat dari bahaya obat ilegal.

Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya membeli obat dari sumber yang terpercaya dan memiliki izin edar juga menjadi fokus BBPOM Mataram. Mereka melakukan sosialisasi melalui berbagai media, termasuk media sosial, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya obat ilegal. BBPOM juga bekerja sama dengan komunitas-komunitas untuk memberikan edukasi langsung kepada masyarakat. Edukasi yang berkelanjutan sangat penting untuk membangun kesadaran masyarakat dan mencegah mereka menjadi korban obat ilegal.

Pemberantasan obat ilegal membutuhkan kerjasama lintas sektor yang kuat. BBPOM Mataram bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, dan aparat penegak hukum untuk memberantas peredaran obat ilegal. Kerjasama ini meliputi pertukaran informasi, koordinasi dalam penindakan, dan edukasi kepada masyarakat. Selain itu, masyarakat juga memiliki peran penting dalam memberantas peredaran obat ilegal. Masyarakat dapat melaporkan kepada BBPOM atau aparat penegak hukum jika menemukan aktivitas mencurigakan terkait peredaran obat ilegal.

Peredaran obat ilegal dapat di tanggulangi melalui strategi komunikasi seperti diungkap oleh Muhammad Taufik selaku pegawai swasta mengatakan bahwa:

“Sebagai seorang pegawai swasta, saya sangat khawatir dengan peredaran obat ilegal di Kota Mataram. Dampaknya tidak hanya pada kesehatan pribadi, tetapi juga pada produktivitas kerja. Saya sering mendengar rekan kerja yang mengeluh sakit kepala, mual, atau efek samping lainnya setelah mengonsumsi obat yang dibeli secara online. Jika kondisi ini terus berlanjut, tentu akan mengganggu kinerja perusahaan.” (Wawancara pada tanggal 6 Februari 2025, pukul 11.00-12.30 Wita).

Informan di atas pada prinsipnya menegaskan bahwa peredaran obat ilegal di Kota Mataram memicu kekhawatiran mendalam. Ancaman ini melampaui ranah kesehatan individu, merambah produktivitas kerja. Keluhan efek samping obat ilegal yang dibeli daring, seperti sakit kepala dan mual, sering terdengar di lingkungan kerja. Kondisi ini mengancam kinerja perusahaan, mengingat karyawan yang sakit tidak dapat bekerja optimal. Selain itu, biaya kesehatan dan premi asuransi berpotensi melonjak akibat meningkatnya kasus penyakit terkait obat ilegal. Perusahaan diharapkan proaktif melalui edukasi dan pengawasan,

sementara pemerintah didesak untuk bertindak tegas dalam penegakan hukum. Kerjasama antara sektor swasta dan pemerintah menjadi kunci utama dalam melindungi masyarakat dan dunia usaha dari bahaya obat ilegal.

Konteks teori sibernetika mengenai peredaran obat ilegal di Kota Mataram dapat dianalisis sebagai sistem yang terdiri dari berbagai elemen yang saling berinteraksi. Sibernetika, sebagai ilmu tentang sistem kendali dan komunikasi, melihat bagaimana informasi mengalir dalam suatu sistem dan bagaimana sistem merespons umpan balik (feedback). Dalam kasus ini, meningkatnya jumlah kasus peredaran obat ilegal menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan penegakan hukum masih menghadapi tantangan dalam mengendalikan jaringan distribusi obat ilegal. Data dari BNNP NTB yang menunjukkan peningkatan kasus dari 1.234 pada tahun 2022 menjadi 1.450 pada tahun 2023 mengindikasikan bahwa sistem pengendalian belum cukup efektif dalam menekan laju peredaran obat ilegal.

Adapun perspektif sibernetika, peredaran obat ilegal di Kota Mataram dapat dianggap sebagai sistem terbuka yang terus beradaptasi dengan kondisi lingkungan. Para pelaku peredaran obat ilegal tidak hanya beroperasi secara konvensional, tetapi juga memanfaatkan teknologi digital sebagai alat komunikasi dan distribusi. Modus operandi yang semakin canggih ini mencerminkan bahwa sistem kriminalitas ini juga memiliki mekanisme umpan balik, di mana mereka terus menyesuaikan strategi untuk menghindari deteksi dan penindakan dari aparat hukum. Tanpa mekanisme kontrol yang lebih kuat, sistem ini akan terus berkembang dan semakin sulit untuk diberantas.

Sistem sibernetika, pengendalian suatu sistem bergantung pada efektivitas umpan balik negatif (negative feedback), yaitu mekanisme yang bertujuan untuk menekan atau mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Dalam konteks ini, tindakan Ditreskrimsus Polda NTB untuk meningkatkan patroli dan memperketat pengawasan dapat dianggap sebagai bentuk umpan balik negatif untuk mengurangi peredaran obat ilegal. Namun, jika upaya ini tidak disertai dengan penguatan sistem komunikasi dan koordinasi antarinstansi, serta peningkatan kesadaran masyarakat, maka sistem peredaran obat ilegal akan tetap mencari celah baru untuk berkembang. Oleh karena itu, pengendalian yang efektif harus mencakup pendekatan yang lebih holistik, termasuk strategi pencegahan melalui edukasi dan kampanye sosial.

Selain mekanisme umpan balik negatif, teori sibernetika juga menekankan pentingnya umpan balik positif (positive feedback) dalam memperkuat sistem yang diinginkan. Dalam

kasus ini, upaya edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya narkoba yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda NTB bersama instansi terkait berfungsi sebagai umpan balik positif untuk memperkuat kesadaran masyarakat terhadap bahaya obat ilegal. Semakin banyak masyarakat yang sadar akan dampak negatif dari obat ilegal, semakin besar kemungkinan mereka berperan aktif dalam mencegah peredarannya, misalnya dengan melaporkan aktivitas mencurigakan atau menolak untuk mengonsumsi obat ilegal. Dengan demikian, sistem komunikasi yang efektif dapat menciptakan efek berantai yang memperkuat pengendalian terhadap peredaran obat ilegal.

Secara keseluruhan, penerapan teori sibernetika dalam memahami peredaran obat ilegal di Kota Mataram menunjukkan bahwa sistem ini tidak bisa hanya dikendalikan dengan tindakan represif saja. Diperlukan keseimbangan antara pengawasan ketat dan peningkatan kesadaran masyarakat agar sistem ini dapat dikendalikan secara efektif. Dengan memperkuat mekanisme umpan balik negatif melalui penegakan hukum yang ketat dan umpan balik positif melalui edukasi yang masif, diharapkan sistem peredaran obat ilegal dapat ditekan secara signifikan dan generasi muda dapat terlindungi dari dampak buruk penyalahgunaan obat terlarang.

Teori sibernetika menekankan bagaimana sistem berinteraksi dan beradaptasi melalui mekanisme umpan balik (feedback). Dalam konteks peredaran obat ilegal di Kota Mataram, tingginya tingkat pengangguran (7,82% pada 2023) menjadi faktor pendorong utama yang menyebabkan individu mencari alternatif ekonomi, termasuk aktivitas ilegal. Sistem peredaran obat ilegal berkembang dengan adanya kondisi ekonomi yang sulit dan lemahnya pengawasan sosial, yang menciptakan siklus umpan balik positif bagi pelaku, di mana keuntungan finansial dari peredaran obat ilegal memperkuat keberlanjutan aktivitas tersebut.

Namun, teori sibernetika juga menawarkan solusi dengan mekanisme umpan balik negatif, yaitu mengurangi insentif bagi masyarakat untuk terlibat dalam peredaran obat ilegal melalui program pemberdayaan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Jika kondisi ekonomi membaik dan masyarakat memiliki akses ke pekerjaan yang layak, maka sistem peredaran obat ilegal akan kehilangan daya tariknya dan secara bertahap melemah. Oleh karena itu, pendekatan penindakan saja tidak cukup; perlu ada perubahan sistemik dalam faktor sosial dan ekonomi agar sistem peredaran obat ilegal dapat dikendalikan secara efektif.

Selanjutnya konteks ini, komunikasi persuasif sangat penting untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap peredaran obat ilegal. Banyak individu yang terlibat dalam aktivitas ini karena mereka melihatnya sebagai solusi ekonomi yang cepat, bukan sebagai

tindakan kriminal yang berisiko. Oleh karena itu, pemerintah dan aparat penegak hukum harus menggunakan komunikasi persuasi untuk membangun kesadaran bahwa keterlibatan dalam peredaran obat ilegal bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga berdampak buruk pada kehidupan jangka panjang, seperti hukuman pidana dan rusaknya hubungan sosial.

Komunikasi persuasi dapat diterapkan melalui berbagai media, seperti kampanye sosial, seminar, dan program edukasi berbasis komunitas. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga dapat memainkan peran penting dalam memberikan edukasi berbasis pengalaman, di mana mantan pelaku atau mantan pengguna obat ilegal berbagi kisah mereka untuk memberikan dampak emosional yang kuat kepada masyarakat. Dengan strategi persuasi yang tepat, masyarakat dapat lebih sadar akan bahaya peredaran obat ilegal dan lebih termotivasi untuk mencari alternatif ekonomi yang legal.

Penanganan peredaran obat ilegal membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, pemerintah, LSM, dan masyarakat. Dalam teori komunikasi organisasi, efektivitas suatu kebijakan sangat bergantung pada bagaimana informasi dikomunikasikan dan dikoordinasikan di antara para pemangku kepentingan. Jika koordinasi antarinstansi berjalan baik, maka strategi penanganan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien.

Pemerintah dapat menggunakan model komunikasi organisasi yang bersifat horizontal dan vertikal. Komunikasi horizontal terjadi antara berbagai instansi, seperti kepolisian, dinas sosial, dan BPOM, yang harus berbagi informasi secara real-time mengenai perkembangan kasus peredaran obat ilegal. Sementara itu, komunikasi vertikal diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat di tingkat atas dapat diterapkan dengan baik di lapangan, termasuk melalui aparat di tingkat daerah dan desa.

Selain itu, komunikasi organisasi juga berperan dalam membangun mekanisme pelaporan masyarakat. Jika masyarakat diberikan akses mudah untuk melaporkan aktivitas mencurigakan tanpa rasa takut, maka sistem pengawasan bisa lebih efektif. Oleh karena itu, perlu ada integrasi sistem pelaporan berbasis teknologi yang memungkinkan masyarakat menyampaikan informasi secara anonim dan aman. Keberhasilan pemberantasan obat ilegal bergantung pada efektivitas komunikasi organisasi antarinstansi yang terlibat. Dinas Perdagangan, BPOM, kepolisian, dan LSM perlu memiliki jalur komunikasi yang jelas untuk berbagi informasi tentang distribusi obat ilegal, modus operandi pelaku, serta tindakan hukum yang sedang berlangsung.

Salah satu bentuk komunikasi organisasi yang efektif adalah koordinasi dalam operasi

razia, di mana setiap instansi memiliki peran yang spesifik. BPOM bertanggung jawab atas pengujian obat yang disita, kepolisian menangani aspek penindakan hukum, sementara Dinas Perdagangan memastikan stabilitas pasar setelah penghapusan produk ilegal. Selain itu, laporan dari masyarakat melalui kanal pengaduan juga menjadi bagian penting dalam alur komunikasi ini, sehingga aparat dapat segera bertindak berdasarkan informasi yang diterima.

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat dikonfirmasi bahwa Kasus peredaran obat ilegal di Kota Mataram dapat dianalisis melalui perspektif teori sibernetika sebagai sistem terbuka yang terus beradaptasi dengan kondisi lingkungan, di mana meningkatnya jumlah kasus dari 1.234 pada tahun 2022 menjadi 1.450 pada tahun 2023 menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan penegakan hukum masih menghadapi tantangan dalam mengendalikan jaringan distribusi obat ilegal, sementara para pelaku terus menyesuaikan strategi menggunakan teknologi digital dan modus operandi yang semakin canggih untuk menghindari deteksi dan penindakan, sehingga diperlukan mekanisme kontrol yang lebih kuat melalui keseimbangan antara umpan balik negatif (*negative feedback*) berupa tindakan represif seperti peningkatan patroli dan pengetatan pengawasan oleh Ditreskrimsus Polda NTB, dan umpan balik positif (*positive feedback*) melalui edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya obat ilegal untuk memperkuat kesadaran masyarakat, selain itu tingginya tingkat pengangguran (7,82% pada 2023) menjadi faktor pendorong utama yang menciptakan siklus umpan balik positif bagi pelaku karena keuntungan finansial dari peredaran obat ilegal memperkuat keberlanjutan aktivitas tersebut, oleh karena itu solusi yang komprehensif harus mencakup program pemberdayaan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja untuk mengurangi insentif bagi masyarakat untuk terlibat dalam peredaran obat ilegal, disertai komunikasi persuasi melalui kampanye sosial, seminar, dan program edukasi berbasis komunitas untuk mengubah cara pandang masyarakat, serta penguatan komunikasi organisasi baik secara horizontal antara berbagai instansi seperti kepolisian, dinas sosial, dan BBPOM untuk berbagi informasi secara real-time, maupun secara vertikal untuk memastikan implementasi kebijakan yang efektif di lapangan, termasuk pengembangan mekanisme pelaporan yang memungkinkan masyarakat menyampaikan informasi secara anonim dan aman.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa strategi komunikasi yang diterapkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda NTB dalam mengungkap, memberantas, dan mengawasi peredaran obat ilegal di Kota Mataram masih menghadapi

tantangan signifikan. Meskipun Ditreskrimsus telah berhasil mengungkap berbagai kasus peredaran obat ilegal, masih terdapat kekurangan dalam koordinasi antar lembaga, pengelolaan komunikasi internal yang efektif, dan adaptasi terhadap perubahan modus operandi yang semakin canggih. Penelitian ini menemukan bahwa komunikasi yang lebih persuasif dan proaktif dengan masyarakat serta peningkatan kapasitas penyidik dalam menggunakan teknologi informasi menjadi kunci penting dalam memperkuat upaya pemberantasan peredaran obat ilegal. Temuan ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman mengenai peran strategi komunikasi dalam keberhasilan pemberantasan kejahatan, terutama dalam konteks yang melibatkan berbagai aktor dan tantangan geografis yang kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, I. S. (2009). *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Diadit Media.
- Andrianto, B., Sunaryo, H., & Wijaya, M. (2019). Pengaruh Gaya Komunikasi Penyidik terhadap Keberhasilan Pengungkapan Kasus Narkoba di Polda Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 13(2), 121-135.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Atmasasmita, R. (2010). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Atmasasmita, R. (2019). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana. Badan Pusat Statistik NTB. (2023). *Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2023*.
- BPOM RI. (2021). *Laporan Tahunan 2020*. Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.
- BPSDM Provinsi NTB. (2023). *Laporan Tahunan Pengembangan Kompetensi ASN*. DeVito, J. A. (2019). *The interpersonal communication book (15th ed.)*. Pearson.
- Dinas Kesehatan NTB. (2021). *Laporan Tahunan Kesehatan Provinsi NTB 2020*.
- Effendy, M. (2005). *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Effendy, O. U. (2017). *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Fadlilah, A., Suryawati, S., & Kristin, E. (2019). Dampak Penggunaan Obat Ilegal terhadap Keberhasilan Terapi: Studi Kasus di Lima Rumah Sakit di Indonesia. *Jurnal Farmasi Klinik Indonesia*, 8(3), 201-215.
- Fajri, M. (2023). *Peran Kemampuan Komunikasi Digital Penyidik dalam Pengungkapan Kasus*

- Obat Ilegal di Era Digital: Studi Kasus di Ditreskrimsus Polda NTB. *Jurnal Keamanan Siber dan Forensik Digital*, 4(1), 55-70
- Fajri, M. (2023). Strategi Pengembangan Kapasitas Penyidik dalam Menghadapi Tantangan Penegakan Hukum Kontemporer. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 17(1), 23- 40.
- Fajri, M., & Putri, D. E. (2022). Variety dalam Gaya Komunikasi Penyidik: Kunci Keberhasilan Pengungkapan Jaringan Obat Ilegal di NTB. *Jurnal Kepolisian dan Keamanan*, 11(3), 201-217.
- Fajri, M., & Rakhmat, J. (2023). Pemanfaatan Teknologi Blockchain dan Kecerdasan Buatan dalam Pemberantasan Obat Ilegal: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Teknologi Farmasi dan Medis*, 12(2), 78-95.
- Hidayat, A. (2023). *Efektivitas Teknik Komunikasi Persuasif dalam Meningkatkan Tingkat Pengungkapan Informasi oleh Tersangka*. *Jurnal Komunikasi dan Keamanan*, 15(2), 45–60.
- <https://www.liputan6.com/news/read/4872183/50-kg-sabu-sabu-diamankan-di-pelabuhan-lembar-lombok>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2023). Laporan Perkembangan Infrastruktur TIK di Indonesia Timur.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2022). Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara di Lapangan. Jakarta: Mabes .
- Komisi Kepolisian Nasional. (2019). Standar Kompetensi Jabatan Kepolisian. Jakarta: Kopolnas.
- Kusuma, B., & Wibowo, D. (2022). *Gaya Komunikasi Penyidik dalam Interogasi: Analisis Variasi Konteks Budaya di Lima Kota Besar Indonesia*. *Jurnal Studi Interaksi Sosial*, 10(3), 123–138.
- Liliweri, A. (2017). *Komunikasi Antar-Personal*. Jakarta: Kencana.
- Littlejohn, S.W. & Foss, K.A. 2009. *Teori Komunikasi*. Edisi 9. Terjemahan Muhammad Yusuf Hamdan: Jakarta: Salemba Humanika
- Manan, B. (2007). *Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Mulyana, D. (2017). *Ilmu komunikasi: Suatu pengantar*. Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, D. (2018). *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugraha, A. (2023). Peran Redundancy dalam Efektivitas Komunikasi Penyidik: Analisis

- Kasus Obat Ilegal di Mataram. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(1), 78- 93.
- Nugraha, A., & Putri, D. E. (2021). Tren Peredaran Obat Ilegal melalui Platform Digital di NTB. *Jurnal Kriminologi dan Kajian Kepolisian*, 5(2), 89-104.
- Nugraha, A., & Rakhmat, J. (2023). Peran Teknologi dalam Meningkatkan Kinerja Penyidik : Studi Kasus di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim . *Jurnal Teknologi dan Keamanan*, 8(1), 55-72
- Nugroho, A. (2022). Komunikasi organisasi dalam koordinasi penyidikan tindak pidana kehutanan antara dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Nurmayanti, S. (2021). Komunikasi interpersonal dalam koordinasi penyidikan tindak pidana lingkungan hidup antara penyidik dan penyidik PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Pemerintah Provinsi NTB. (2022). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Polda NTB. (2022). Laporan Tahunan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda NTB 2021.
- Pratama, A. (2019). Komunikasi dan koordinasi penyidik dengan penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penanganan tindak pidana lingkungan hidup.
- Pratama, R. (2021). Penerapan Teori Sibernatika dalam Komunikasi Penyidikan Kasus Obat Ilegal di Polda NTB. *Jurnal Komunikasi Kepolisian*, 9(2), 112-128.
- Pratiwi, A. (2020). Strategi Komunikasi Penyidik dalam Penanganan Kasus Obat Ilegal di Polda NTB. *Jurnal Komunikasi Nusantara*, 2(1), 1-12.
- Pratiwi, A. (2023). Efektivitas Kerjasama Internasional dalam Pemberantasan Obat Ilegal: Studi Kasus Indonesia dalam Konteks ASEAN. *Jurnal Hubungan Internasional*, 15(1), 45-62.
- Priyatno, D. (2006). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian Universitas Mataram. (2023). Tantangan Keamanan Siber dalam Komunikasi Lembaga Penegak Hukum di NTB.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahmat, A. (2017). *Komunikasi organisasi: Teori dan studi kasus*. Prenada Media.
- Rohmat, M. (2020). Komunikasi organisasi dalam koordinasi penyidikan tindak pidana perbankan antara dan Otoritas Jasa Keuangan.
- Sadjijono. (2008). *Hukum Kepolisian: dan Good Governance*. Surabaya: Laksbang Mediatama.

- Saputra, R. (2020). Koordinasi penyidikan tindak pidana perikanan oleh penyidik dan penyidik PPNS Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Sari, D. P. (2024). Analisis peran komunikasi interpersonal dalam koordinasi penyidikan antara penyidik dan penyidik PPNS Bea Cukai.
- Siahaan, D. N. (2020). Strategi Pemberantasan Obat Ilegal di Indonesia: Analisis Kebijakan dan Implementasi. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 9(1), 32- 45.
- Siahaan, D. N. (2021). Tantangan Pemberantasan Obat Ilegal di Era Digital. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 17(1), 45-58.
- Siahaan, D. N., & Rakhmat, J. (2023). Strategi Noise Reduction dalam Komunikasi Penyidik: Implikasinya terhadap Efektivitas Pemberantasan Obat Ilegal di Mataram. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 27(1), 1-18.
- Soekanto, S. (2004). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Surya, A., Pratiwi, B., & Mulyani, S. (2019). Analisis Pola Komunikasi antar Lembaga Penegak Hukum di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 5, No. 2.
- Suryani, L. (2019). Peran Komunikasi Antarbudaya dalam Penyidikan Kasus Narkoba di NTB. *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 7(2), 201-218.
- Suryanto, A. (2020). Pola komunikasi penyidik dan penyidik PPNS dalam koordinasi penanganan tindak pidana kehutanan di wilayah hukum Polda Kalimantan Barat.
- Susanto, S. (2021). Gaya komunikasi penyidik kepolisian dalam mengkoordinasikan penyidik PPNS: Studi kasus di Polda Jawa Timur.
- Trisnawati, R. E., & Mulyani, S. R. (2018). Budaya organisasi dalam komunikasi antar anggota kepolisian (Studi kasus di Polres Kebumen). *Jurnal Komunikasi*, 12(2), 175-192.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Widodo, S., & Suryani, L. (2022). Manajemen Entropy dalam Komunikasi Penyidikan: Studi Kasus Pemberantasan Obat Ilegal di Ditreskrimsus Polda NTB. *Jurnal Manajemen Komunikasi*, 6(1), 45-60.
- Widodo, S., Prasetyo, B., & Utami, R. (2022). Penerapan Prinsip Psikologi Komunikasi dalam

- Interogasi Kasus Obat Ilegal di Polda NTB. *Jurnal Psikologi Kepolisian*, 8(1), 67-82.
- Widyastuti, T. (2018). Komunikasi antarpribadi penyidik dan penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penanganan tindak pidana korupsi.
- Wijaya, A., & Putri, D. E. (2022). Etika dan Integritas Penyidik : Studi Kasus di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. *Jurnal Etika Hukum*, 6(2), 112-128.
- Wijaya, A., Suryawati, S., & Utami, R. (2022). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Obat Ilegal di Masyarakat: Studi Kasus di Tiga Provinsi di Indonesia. *Jurnal Farmasi dan Ilmu Kefarmasian Indonesia*, 9(1), 1-15.
- Wijaya, & Sutanto. (2023). Pengaruh Budaya Lokal terhadap Efektivitas Komunikasi Organisasi di NTB. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, Vol. 24, No. 1.